

FDK UIN SUNAN KALIJAGA

## Hadirkan Pameran Gelar Karya

**YOGYA (KR)** - Panitia Gelar Karya Fakultas Dakwah & Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta silaturahmi ke kantor Kedaulatan Rakyat pada hari Jumat (27/9). Rombongan panitia terdiri atas Wakil Dekan 1 Irsyadunnas, Ketua PPTD Evi Septiani, dan Ketua Panitia Gelar Karya FDK 2024 Muhammad Izzul Haq.

Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Litbang, Pengawasan dan Bisnis KR Group Yoeke Indra Agung Laksana SE, Komisaris H.M. Wirmon Samawi, SE,

MIB, dan Pimpinan Remaja KR Dr. Drs. H. Octo Lampito, MPd. Anjansana dari panitia gelar karya ini untuk mempublikasikan rencana kegiatan pada hari

Senin, 30 September 2024 bertempat di lobby Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Irsyadunnas menuturkan FDK akan menyelenggarakan Pameran Gelar Karya FDK yang melibatkan 3 divisi komunitas. "Pameran terdiri dari Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD)-SUKA TV, Rasida, dan DIFIKOM, dan 5 Laboratorium Prodi-Komunikasi & Penyiaran Is-

lam (KPI), Bimbingan & Konseling Islam (BKI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD), dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)," ujar Dr. Irsyadunnas.

Muhammad Izzul Haq menuturkan, kegiatan Pameran Gelar Karya FDK tersebut bertujuan untuk mengapresiasi dan memamerkan karya dari masing-masing divisi PPTD dan Laboratorium Prodi di FDK.

"Tujuannya mengapresiasi dan mengenalkan karya mahasiswa, memotivasi, dan mencari masukan ke depannya. Dengan mengusung tema The Sustainable Dakwah. Bagaimana sebaiknya membangun dan menjaga NKRI untuk lebih baik dan harmonis," ujarnya.

Ia mengatakan dalam Gelar Karya FDK akan ada pameran foto, pemutaran konten, interaksi simulasi pengunjung, hingga talkshow. "Targetnya ialah ingin mentradisikan kegiatan pameran gelar karya sebagai sarana silaturahmi antara prodi. Memberi kesempatan masing-masing prodi untuk mencari masukan. Hal itu sebagai acuan event ke depannya. Interaksi dari pameran pasti akan ada sebuah progres yang mencuatkan ide-ide baru," ujar Izzul. (\*3)-f

## DIMERIAHKAN JALAN BAHAGIA BARENG KANCA IKA Pawitkra SMPN 5 Yogya Gelar Munas Pertama



KR-Istimewa

**Alumni Pawitkra saat kegiatan Jalan Bahagia Bareng Kanca memeriahkan Munas.**

**YOGYA (KR)** - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pawitkra SMP Negeri 5 Yogyakarta menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 di Hotel Santika Yogyakarta, hari ini, Minggu (29/9). Untuk memeriahkan munas, diadakan kegiatan Jalan Bahagia Bareng Kanca, sehari sebelumnya.

Ketua Panitia Pelaksana Munas IKA Pawitkra, Damayanti Sari Rohmaningtyas (Pawitkra 90) menuturkan, agenda utama munas adalah memilih Ketua IKA Pawitkra yang baru untuk masa bakti 2024-2029 dan formatur yang akan melengkapi kepengurusan. Ada tujuh calon ketua (dari 6 angkatan) yang akan dipilih dalam munas ini. Selain pemilihan ketua, agenda lainnya penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus IKA Pawitkra periode sebelumnya.

Menurutnya, sejak berdiri tahun 1951 hingga saat ini, SMPN 5 Yogyakarta telah melahirkan 70 angkatan dengan jumlah alumni sekitar 25.000 orang yang telah berkiprah dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sedangkan IKA Pawitkra dibentuk pada 17 Juli 2017 dan telah banyak kegiatan yang dilakukan dan berkontribusi bagi almamater, bangsa dan negara.

"Munas ini dimaksudkan untuk penyeragaman organisasi IKA Pawitkra sekaligus re-

generasi/estafet kepemimpinan kepada alumni yang lebih muda. Diharapkan ketua baru yang terpilih kredibel, tangguh dan bisa mengayomi. Dengan penyegaran ini diharapkan organisasi IKA Pawitkra bisa berjalan lebih optimal, dan tentunya memberikan kesempatan potensi alumni muda untuk tampil," kata Tyas kepada KR, Sabtu (28/9).

Diah Restu Marini (Pawitkra 90) selaku panitia seksi humas dan media menambahkan, munas ini sekaligus menjadi wahana silaturahmi lintas angkatan. Tercatat ada 32 angkatan yang hadir dalam munas, tertua angkatan 1961 dan termuda angkatan 2024. Munas akan diteruskan persembahkan musik oleh duet gitar Shaina & Ageng (Pawitkra 2024).

Adapun terkait kegiatan Jalan Bahagia Bareng Kanca, menurut Tyas, diikuti tak kurang 200 alumni dengan rute mengelilingi sekolah, sekaligus mengenang saat pelajaran olahraga. Setelah itu para alumni melihat kelas dan fasilitas sekolah seperti aula, sport hall dan lainnya, dilanjutkan flashmob, line dance dan diteruskan pembagian doorprize. "Kegiatan Jalan Bahagia Bareng Kanca ini menjadi wahana silaturahmi dan memberikan kesempatan teman-teman kepada alumni yang tidak bisa menghadiri munas," katanya. (Dev) -f



KR: Risbika Putri

**Panitia Gelar Karya Fakultas Dakwah & Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Direksi dan Komisaris KR**



KR- Franz Boedisukamanto

**Gramm Hotel By Ambarrukmo**



KR- Franz Boedisukamanto

**Plaza Ambarrukmo**



KR- Franz Boedisukamanto

**Royal Ambarrukmo Yogyakarta**



KR- Franz Boedisukamanto

**Tara Hotel Yogyakarta**



KR- Franz Boedisukamanto

**Corporate Communication BRI**



KR- Franz Boedisukamanto

**The Malioboro Hotel**



KR- Franz Boedisukamanto

**Fortuna Grande Yogyakarta**



KR- Franz Boedisukamanto

**Malioboro Mall**



KR- Franz Boedisukamanto

**Luxury Malioboro Hotel**



**Anggrismono, SE MEd Dev**  
Kaprodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta

## Sertifikasi Halal, Kebutuhan Umat dan Komersialisasi

regulasi yang belum sepenuhnya efektif hingga komersialisasi yang menghambat akses masyarakat terhadap produk halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Namun, implementasi aturan ini masih bertahap. Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM baru akan berlaku pada tahun 2026, sementara untuk pengusaha besar dan menengah pada Oktober 2024.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan masih banyaknya produk yang belum terjamin kehalalannya di pasaran. Masyarakat Muslim di Indonesia masih

harus berhati-hati dalam memilih produk, terutama makanan dan minuman, untuk memastikan kehalalannya.

Sistem ekonomi kapitalis hari ini yang berorientasi pada keuntungan seringkali mengabaikan aspek kesehatan dan keamanan pangan, termasuk kehalalan produk. Banyak produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar halal dan thayyib, bahkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Fenomena ini diperparah dengan lemahnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah. Negara terkesan abai dalam menentukan standar keamanan pangan dan menjamin ketersediaan makanan halal dan thayyib bagi masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pertemuannya dengan perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Shanghai dan penguasa sektor halal di China tahun lalu menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga cerminan standar kualitas dan keamanan produk. Indonesia berkomitmen untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia, sejalan dengan meningkatnya permintaan produk halal secara global.

Hal itu meniscayakan kehadiran negara untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam sertifikasi halal dan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap produk halal.

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh negara antara lain: (1) Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal dan thayyib melalui berbagai media dan sarana. (2) Regulasi dan Pengawasan: Memperkuat regulasi terkait produksi dan distribusi produk halal, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. (3) Sertifikasi Halal Gratis: Menyediakan layanan sertifikasi halal gratis dan mudah diakses bagi seluruh pelaku usaha, terutama UMKM. (4) Sanksi Tegas: Memberikan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar ketentuan halal, termasuk yang menggunakan bahan haram atau memproduksi makanan haram.

Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan sertifikasi halal gratis, jumlahnya masih terbatas dan belum mencakup seluruh pelaku usaha. Selain itu, sertifikasi halal masih memiliki biaya tambahan seperti pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini menunjukkan adanya komersialisasi dalam proses sertifikasi halal, yang berbeda dengan prinsip Islam bahwa negara harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya tanpa membebani biaya.

Sertifikasi halal merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari agama, kesehatan, hingga ekonomi. Negara memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan produk halal dan thayyib bagi masyarakat,



serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk komersialisasi sertifikasi halal. Negara mestinya hadir dalam memberikan jaminan halal secara gratis dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, karena produk yang halal juga memiliki implikasi spiritual yang berdampak pada kehidupan akhirat. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip halal dan thayyib, baik di tingkat nasional maupun global. Wallahua'lam. \*\*\*